

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pulau Jawa merupakan episentrum pertumbuhan ekonomi nasional, namun pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah ini masih menghadapi tantangan ketimpangan yang lebar antara kawasan industri perkotaan dengan wilayah penyangga. Ketimpangan kualitas pembangunan manusia antarwilayah masih menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan dan penggerak ekonomi nasional, Pulau Jawa hingga kini tetap menjadi wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi sekaligus titik sentral aktivitas negara. Di Indonesia, peningkatan IPM menjadi sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) guna mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, dan adil melalui percepatan pembangunan di segala sektor (Salsabila & Hasmarini, 2023).

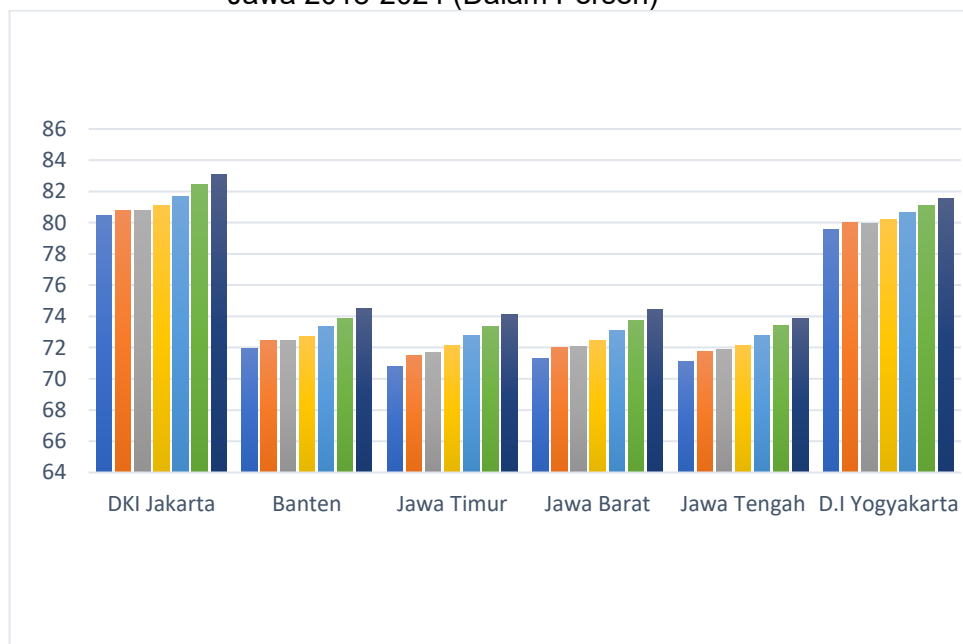
Pembangunan dapat didefinisikan sebagai proses terencana untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas ekonomi, sehingga mendorong perubahan menuju pertumbuhan yang lebih baik dan berkelanjutan. Pembangunan tidak hanya berfokus pada peningkatan capaian ekonomi tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan distribusi kesejahteraan publik yang adil. Dalam proses ini, peran para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, sangat penting dalam merumuskan kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk di sektor kesehatan. Pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan publik, karena kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk melakukan aktivitas dan bekerja secara optimal. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan

manusia dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah indikator komposit yang mencerminkan pencapaian pembangunan di tiga dimensi dasar: kesehatan (diukur dengan harapan hidup), pendidikan (diukur dengan rata-rata tahun sekolah dan perkiraan tahun sekolah), dan standar hidup yang layak (diukur dengan pengeluaran atau pendapatan per kapita). Dengan menggunakan IPM, peneliti dapat menilai sejauh mana kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan telah meningkat (Nugrahadi & Rinaldi, 2018).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan gambaran mengenai efektivitas anggaran dan pelaksanaan program pembangunan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan. Bagi pemerintah, IPM merupakan data yang bersifat strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai indikator kinerja pembangunan, tetapi juga sebagai alat untuk mengidentifikasi wilayah yang masih memerlukan perhatian khusus serta mendorong pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijadikan dasar dalam menentukan prioritas dan alokasi anggaran pembangunan secara lebih tepat sasaran. Konsep pengukuran pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* pada tahun 1990 melalui gagasan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejak saat itu, IPM dipublikasikan secara rutin dalam laporan tahunan yang dikenal sebagai *Human Development Report*. IPM menggambarkan sejauh mana masyarakat mampu mengakses hasil-hasil pembangunan, yang tercermin dari kemampuan memperoleh pendapatan, menikmati layanan kesehatan, menempuh pendidikan, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan (Fauzan *et. al*, 2020).

Indonesia masih menghadapi persoalan ketimpangan kualitas pembangunan manusia yang belum tersebar secara merata di setiap wilayah. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan tingkat pendidikan, kesehatan, serta standar hidup masyarakat antar daerah yang masih cukup tinggi. Pulau Jawa merupakan pulau dengan jumlah penduduk tertinggi di Indonesia sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian nasional. Tingginya aktivitas ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta konsentrasi fasilitas pendidikan dan kesehatan di Pulau Jawa menjadikan wilayah ini memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (Salsabila & Hasmarini, 2023).

Gambar 1 . 1 Data Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi di Pulau Jawa 2018-2024 (Dalam Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

Berdasarkan gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa secara umum berada di atas rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di wilayah Jawa relatif lebih baik dibandingkan dengan banyak wilayah lain di Indonesia. Tingginya IPM di Pulau Jawa dipengaruhi oleh konsentrasi aktivitas ekonomi, fasilitas pendidikan yang lebih

lengkap, serta akses layanan kesehatan yang relatif lebih baik. DKI Jakarta memiliki IPM tertinggi di Pulau Jawa dan termasuk kategori sangat tinggi secara nasional. Hal ini didukung oleh pendapatan per kapita yang besar, fasilitas kesehatan modern, serta akses pendidikan yang luas. D.I Yogyakarta juga memiliki IPM sangat tinggi, terutama karena indikator pendidikan yang unggul (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah relatif tinggi). Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur berada pada kategori tinggi, namun masih menghadapi tantangan pemerataan antar kabupaten/kota. Banten juga termasuk kategori tinggi, meskipun terdapat ketimpangan antara wilayah industri dan wilayah perdesaan. Meskipun IPM di Pulau Jawa tergolong tinggi, masih terdapat disparitas antar daerah, terutama wilayah perkotaan dan perdesaan. Faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut antara lain yaitu tingkat pendapatan, akses pendidikan, kualitas layanan kesehatan, serta infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi.

Kualitas pendidikan yang baik merupakan faktor penting dalam meningkatkan sumber daya manusia dan mendorong kemajuan suatu negara. Kondisi demografi dapat memberikan dampak positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana suatu negara mengelolanya. Dampak positif muncul ketika jumlah penduduk usia produktif yang besar diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, sehingga berpotensi menghasilkan bonus demografi yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat tidak memadai, jumlah penduduk yang besar justru dapat menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi yang dikenal sebagai bom demografi. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan kondisi kesehatannya. Pendidikan yang layak akan meningkatkan kemampuan berpikir, keterampilan, serta kreativitas

tenaga kerja, sehingga produktivitasnya meningkat. Sementara itu, kondisi kesehatan yang baik memungkinkan tenaga kerja memiliki daya tahan fisik yang optimal, mampu bekerja secara lebih efektif, serta berkontribusi secara maksimal dalam kegiatan ekonomi (Nursita *et. al*, 2022)

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal dalam menjaga stabilitas dan memacu pertumbuhan ekonomi. Seiring berjalannya waktu keterlibatan pemerintah yang semakin menunjukkan intensif di berbagai sektor ekonomi dari waktu ke waktu. Upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) direalisasikan melalui belanja publik yang tepat sasaran. Sesuai mandat UU No. 23 Tahun 2014, anggaran daerah harus difokuskan pada penguatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini mencakup penyediaan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur sosial yang memadai, dengan tetap mengacu pada parameter standar belanja dan tolak ukur kinerja yang transparan menurut Kuncoro, (2013) dalam penelitian (Merang *et. al*, 2021).

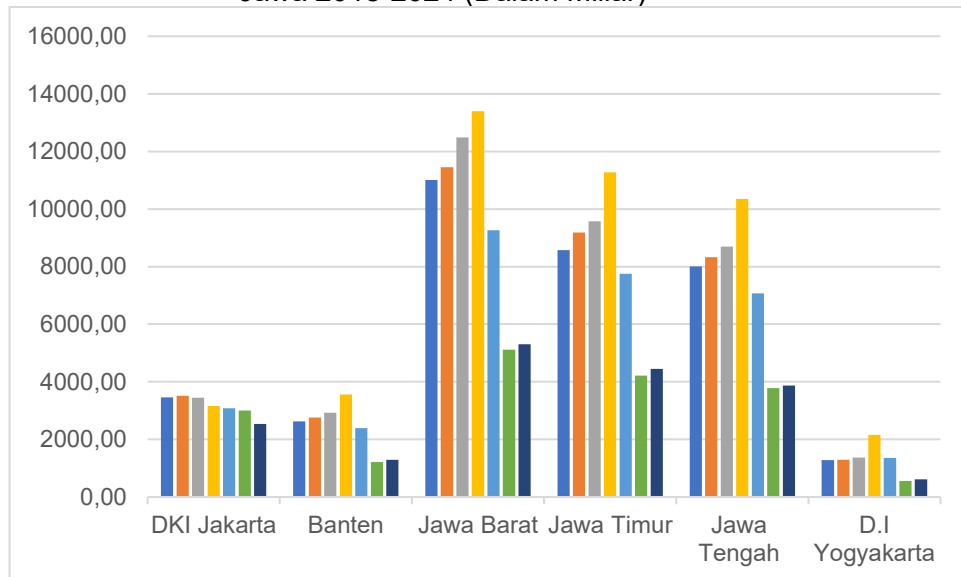
Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 dan Pasal 49 UU Sistem Pendidikan Nasional, mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD. Dana tersebut dialokasikan untuk memajukan sektor pendidikan serta menyediakan bantuan finansial seperti dana BOS dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam mencerdaskan bangsa, pemerintah berupaya meningkatkan taraf hidup penduduk dengan menjamin akses terhadap fasilitas sekolah yang berkualitas dan memotivasi masyarakat untuk menempuh pendidikan hingga jenjang tertinggi (Meydiasari & Soejoto, 2017)

Pengaturan mengenai pembiayaan pendidikan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Dalam ketentuan tersebut, Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab untuk menetapkan pedoman umum terkait dukungan pendanaan pada seluruh jenjang dan program pendidikan. Selain itu, Pemerintah Pusat menjadi penanggung jawab utama dalam penyediaan dana bagi pendidikan tinggi. Di luar tanggung jawab pokok tersebut, Pemerintah Pusat juga memberikan bantuan atau subsidi tambahan untuk pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, serta layanan pendidikan khusus.

Di tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi memiliki tanggung jawab utama dalam pembiayaan pendidikan menengah, pendidikan nonformal, dan layanan pendidikan khusus. Sementara itu, dalam kerangka otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pemerintah daerah tingkat II bertanggung jawab menyediakan pendanaan bagi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal. Dengan demikian, fokus utama pembiayaan di tingkat kabupaten/kota terletak pada jenjang pendidikan tersebut. Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan operasional dan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik usia sekolah. Pada praktiknya, mekanisme pengalokasian dana operasional di setiap kabupaten/kota tidak selalu sama. Umumnya, Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota berperan dalam perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan belanja yang berkaitan dengan koordinasi dan manajemen pendidikan. Walaupun proses koordinasi penganggaran untuk sekolah dasar relatif seragam, mekanisme penganggaran untuk jenjang SMP dan SMA/SMK dapat berbeda antar daerah. Secara keseluruhan, pendanaan sektor pendidikan di tingkat kabupaten/kota

bersumber dari kontribusi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Palupi, 2016).

Gambar 1 . 2 Data Realisasi Anggaran Program Urusan Pendidikan di Provinsi Jawa 2018-2024 (Dalam Miliar)



Sumber: Kemendikdasmen (2026)

Berdasarkan Gambar 1.2 realisasi anggaran pemerintah sektor pendidikan di provinsi-provinsi Pulau Jawa selama periode 2018-2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada periode 2018-2021, sebagian besar provinsi mengalami peningkatan realisasi anggaran pendidikan. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan D.I. Yogyakarta menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai nilai tertinggi pada tahun 2021. Namun, pada periode 2022-2024 terjadi penurunan realisasi anggaran pendidikan di hampir seluruh provinsi, meskipun besarnya penurunan berbeda-beda pada masing-masing daerah. Jawa Barat dan Jawa Timur tetap menjadi provinsi dengan realisasi anggaran pendidikan terbesar dibandingkan provinsi lainnya, sedangkan D.I. Yogyakarta memiliki realisasi anggaran yang relatif paling rendah. Secara keseluruhan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran pemerintah sektor pendidikan di Pulau Jawa belum mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahun, melainkan

mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh kebijakan penganggaran dan prioritas pembangunan pada masing-masing periode.

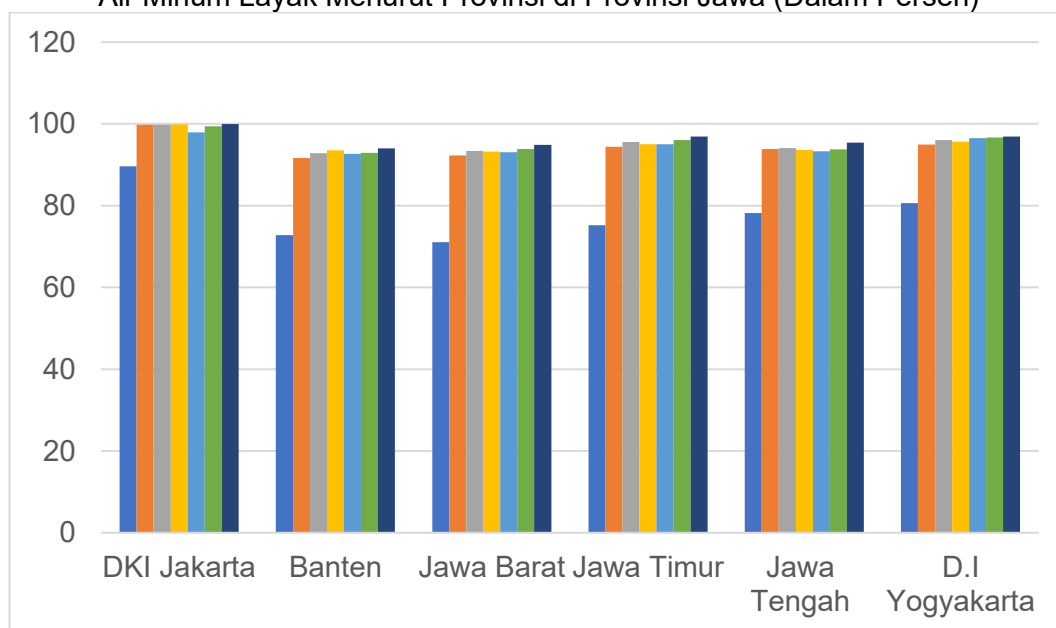
Pendidikan merupakan salah satu dimensi utama dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, peningkatan realisasi anggaran pemerintah sektor pendidikan pada dasarnya diharapkan dapat memperbaiki kualitas layanan pendidikan, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perbaikan pada sektor pendidikan tersebut pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan nilai IPM (Djohan *et. al*, 2023)

Namun demikian, fluktuasi realisasi anggaran pendidikan yang terjadi di provinsi-provinsi Pulau Jawa menunjukkan bahwa besarnya anggaran yang direalisasikan belum tentu secara langsung berdampak pada peningkatan IPM. Efektivitas penggunaan anggaran, ketepatan sasaran program pendidikan, serta adanya jeda waktu (*time lag*) antara pelaksanaan program dan hasil yang diperoleh menjadi faktor yang dapat memengaruhi hubungan antara realisasi anggaran pendidikan dan IPM. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pengaruh realisasi anggaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa tahun 2018-2024.

Air merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting dalam menunjang keberlangsungan kehidupan dan aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari. Ketersediaan air minum yang layak masih menjadi persoalan mendasar di Indonesia. Pada tingkat kabupaten, rata-rata persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air bersih masih belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan akses air, khususnya untuk kebutuhan air minum yang layak, masih

menghadapi kesenjangan yang cukup besar di berbagai wilayah. Ketimpangan akses terhadap air minum yang layak tersebut diduga turut berkontribusi terhadap adanya perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah serta relatif rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia. Akses air minum layak merujuk pada ketersediaan sumber air yang aman untuk dikonsumsi, terlindungi dari pencemaran, serta memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan, seperti air yang berasal dari jaringan perpipaan, sumur terlindung. Dengan demikian, penyediaan akses air bersih yang merata menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat (Sukartini & Samsubar, 2016).

Gambar 1 . 3 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Provinsi di Provinsi Jawa (Dalam Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

Berdasarkan Gambar 1.3 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Pulau Jawa menunjukkan kecenderungan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa mengalami peningkatan akses air minum layak selama periode 2018-2024. Kondisi ini menunjukkan adanya

perbaikan dalam penyediaan infrastruktur air bersih serta meningkatnya upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan masyarakat. Provinsi dengan tingkat akses air minum layak tertinggi adalah DKI Jakarta, yang pada tahun 2024 hampir mencapai 100 persen. Sementara itu, provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DI Yogyakarta juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Meskipun akses terhadap air minum layak di Pulau Jawa mengalami peningkatan yang cukup pesat, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah provinsi. Berdasarkan data tahun 2024 dari Badan Pusat Statistik, lebih dari 85% rumah tangga di Pulau Jawa telah memiliki akses terhadap air minum layak. Ketersediaan akses terhadap air minum yang layak merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Akan tetapi, ketersediaan akses tersebut tidak selalu diikuti dengan mutu air yang memenuhi standar kesehatan, sehingga belum mampu secara optimal menunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat. Air minum yang aman dan sanitasi yang baik dapat membantu mencegah berbagai penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak higienis, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penyediaan akses air minum yang layak menjadi bagian penting dalam upaya pembangunan sektor kesehatan. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks seiring dengan laju urbanisasi yang terus meningkat serta tekanan terhadap sumber daya alam, yang berdampak pada ketersediaan dan kualitas air bersih di wilayah tersebut (Khaerunnisa & Purnamaningrum, 2025).

Salah satu komponen penting dalam penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah aspek kesehatan. Kondisi kesehatan masyarakat sangat

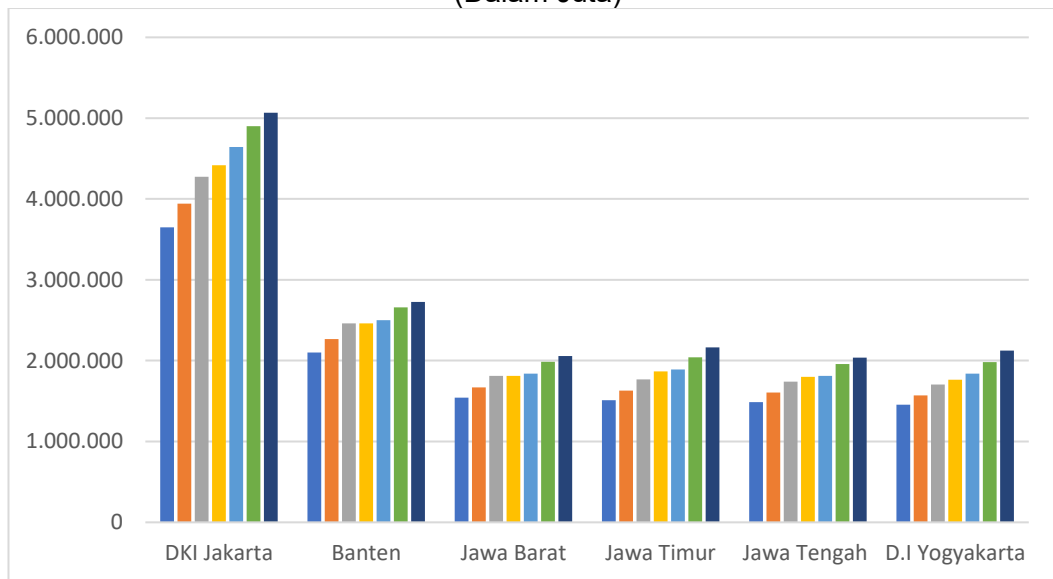
dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai serta lingkungan dengan sanitasi yang baik. Oleh karena itu, pemerintah menunjukkan komitmen yang cukup kuat dalam menangani permasalahan sanitasi dan penyediaan air bersih di Indonesia. Upaya tersebut tercermin dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta agenda pembangunan global *United Nations* melalui program *Sustainable Development Goals*. Sanitasi dan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi setiap individu karena berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan terkait sanitasi dan ketersediaan air bersih tidak hanya menjadi tantangan di Indonesia, tetapi juga merupakan isu global yang dihadapi oleh banyak negara. Dalam kerangka *Sustainable Development Goals*, penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak menjadi tujuan ke-6 yang menekankan pentingnya menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi salah satu prioritas penting yang harus dilaksanakan secara serius agar target pembangunan berkelanjutan dapat tercapai (Purwaningsih *et. al*, 2021).

Upah merupakan sumber utama pendapatan bagi tenaga kerja. Apabila tingkat upah mengalami penurunan atau tidak mengalami peningkatan, maka kesejahteraan pekerja cenderung menurun atau tetap, yang pada akhirnya dapat berdampak pada meningkatnya tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, perubahan dalam besaran upah memiliki hubungan yang erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam praktiknya, meskipun secara nominal upah terlihat cukup tinggi secara riil nilainya sering kali relatif rendah. Hal ini terjadi karena daya beli

masyarakat dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Ketika harga barang dan jasa meningkat lebih cepat dibandingkan kenaikan upah, maka kemampuan pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi berkurang. Kondisi tersebut dapat menyebabkan menurunnya standar hidup, menurunnya kerentanan ekonomi, serta memperbesar risiko kemiskinan, terutama bagi kelompok pekerja berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, kebijakan pengupahan tidak hanya perlu mempertimbangkan besaran nominal, tetapi juga nilai riil dan kemampuan upah dalam memenuhi kebutuhan hidup layak (Setya, 2017).

Upah minimum merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan pekerja di suatu daerah. Kebijakan penetapan upah minimum dilakukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kebutuhan hidup layak masyarakat. Peningkatan upah minimum diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pekerja sehingga dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat. Perkembangan upah minimum provinsi di Pulau Jawa selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 1 . 4 Data Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2024
(Dalam Juta)



Sumber: *Badan Pusat Statistik (2026)*

Berdasarkan Gambar 1.4 data Upah Minimum Provinsi (UMP) di Pulau Jawa tahun 2018-2024 menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan upah minimum di seluruh provinsi setiap tahunnya. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya upaya pemerintah dalam menyesuaikan tingkat upah dengan kondisi ekonomi, inflasi, serta kebutuhan hidup layak bagi para pekerja. Selama periode tersebut, Provinsi DKI Jakarta tercatat memiliki tingkat upah minimum tertinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan oleh tingginya aktivitas ekonomi dan biaya hidup di wilayah tersebut. Sementara itu, provinsi seperti Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat upah minimum yang relatif lebih rendah, meskipun tetap mengalami kenaikan setiap tahun. Perbedaan tingkat upah minimum antar provinsi ini menunjukkan adanya variasi kondisi ekonomi dan tingkat produktivitas daerah yang berbeda-beda. Kenaikan upah minimum diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas

hidup penduduk yang pada akhirnya dapat memengaruhi pembangunan manusia di suatu wilayah.

Meskipun upah minimum di provinsi-provinsi Pulau Jawa terus meningkat, kenaikan tersebut belum tentu diikuti oleh peningkatan kualitas pembangunan manusia secara merata. Hal ini karena IPM tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tetapi juga oleh faktor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan fasilitas dasar. Di sisi lain, masih terdapat disparitas capaian IPM antar provinsi di Pulau Jawa. Realisasi anggaran pendidikan juga mengalami fluktuasi, sementara akses air bersih belum merata sehingga berpotensi memengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu, dampak kenaikan upah minimum terhadap standar hidup layak dapat berkurang akibat inflasi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mengkaji pengaruh realisasi anggaran pendidikan, akses air bersih, dan upah minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Ulum, (2022) membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki pengaruh negatif serta signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahimah, (2020) menyatakan bahwa realisasi anggaran pemerintah sektor pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan secara parsial berpengaruh positif signifikan. Selanjutnya studi yang dilakukan oleh Khaerunnisa & Kunawangsih Purnamaningrum, (2025) ditemukan bahwa akses air bersih berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini didukung oleh penelitian Armawaddin & Barani, (2025), menunjukkan bahwa akses air bersih berpengaruh positif namun tidak

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu *et. al*, (2025) menunjukkan bahwa Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Ulum, (2022) mengatakan bahwa Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu, adapun penelitian yang dilakukan Tria Resmana & Gunawan, (2025) menunjukkan hasil yang sama bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Masih terdapat hasil yang tidak konsisten dari hasil penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dapat diketahui adanya beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. Pada variabel realisasi anggaran pemerintah sektor pendidikan, beberapa penelitian menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sementara penelitian lain justru menemukan pengaruh negatif signifikan atau tidak signifikan. Hal serupa juga terjadi pada variabel akses air bersih, di mana secara teoritis variabel ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup, namun secara empiris beberapa penelitian menunjukkan hasil yang belum konsisten. Sementara itu, variabel upah minimum umumnya menunjukkan pengaruh positif terhadap IPM, tetapi pengaruh tersebut masih perlu diuji lebih lanjut pada konteks wilayah yang berbeda.

Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung hanya menggunakan satu atau dua variabel independen dalam menjelaskan IPM, seperti pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, sanitasi, akses air minum layak, atau upah minimum secara terpisah. Penelitian yang menggabungkan realisasi anggaran pemerintah sektor pendidikan, akses air bersih, dan upah minimum secara

simultan dalam satu model analisis masih relatif terbatas. Padahal ketiga variabel tersebut mewakili dimensi penting pembangunan manusia, yaitu pendidikan, kesehatan/layanan dasar, dan standar hidup layak.

Dari sisi objek penelitian, sebagian penelitian terdahulu dilakukan pada tingkat nasional atau hanya berfokus pada satu provinsi tertentu, sehingga belum banyak yang secara khusus menelaah kondisi provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Padahal Pulau Jawa memiliki karakteristik yang unik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional, namun tetap menghadapi ketimpangan pembangunan manusia antarwilayah. Selain itu, penggunaan periode 2018-2024 dalam penelitian ini memberikan kebaruan karena mampu menggambarkan kondisi yang lebih aktual terkait dinamika realisasi anggaran pendidikan, akses air bersih, upah minimum, dan capaian IPM di Pulau Jawa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel independen (X) yang digunakan yaitu Realisasi Anggaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Akses Air Bersih dan Upah Minimum serta lokasi penelitian yang berbeda yaitu pada Provinsi di Pulau Jawa. Keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terdapat variabel bebas dan variabel terikat yang sama sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti untuk membandingkan hasil penelitian, kemudian diharapkan dengan adanya kesamaan variabel dapat membantu mendukung hasil dari penelitian.

Objek penelitian dilakukan pada Provinsi di Pulau Jawa yang terdiri dari 5 Provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan D.I Yogyakarta dengan periode tahun 2018-2024. Penggunaan tahun 2018-2024 dikarenakan dalam kurun waktu tersebut merupakan rentang waktu yang relatif terbaru sehingga mampu menggambarkan kondisi pembangunan manusia di

Pulau Jawa secara lebih aktual. Pemilihan periode ini juga mempertimbangkan ketersediaan dan konsistensi data sekunder dari instansi resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga pemerintah terkait, sehingga mendukung kelayakan analisis penelitian.

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan dasar empiris bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi efektivitas belanja sektor pendidikan, kebijakan pengupahan, serta pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih. Dengan mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh terhadap IPM, pemerintah dapat menyusun prioritas kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data. Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur Ekonomi Pembangunan khususnya dalam kajian pembangunan manusia di Pulau Jawa dengan menggunakan pendekatan data panel terbaru. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami seberapa besar pengaruh realisasi anggaran pendidikan, akses air bersih, dan upah minimum terhadap IPM secara parsial maupun simultan. Terlebih lagi, penelitian ini menggunakan pendekatan regresi data panel periode 2018-2024, yang mencakup masa sebelum, saat, dan pasca pandemi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika pembangunan manusia di Pulau Jawa. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjawab kesenjangan empiris mengenai efektivitas kebijakan publik daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mencoba membahas topik ini dengan mengangkat judul "Pengaruh Realisasi

Anggaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Akses Air Bersih, dan Upah Minimum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa Tahun 2018-2024: Pendekatan Regresi Data Panel.”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang perlu diperhatikan lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi anggaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa tahun 2018-2024?
2. Bagaimana akses air bersih berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa tahun 2018-2024?
3. Bagaimana upah minimum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa tahun 2018-2024?
4. Bagaimana realisasi anggaran pemerintah sektor pendidikan, akses air bersih, dan upah minimum secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa tahun 2018-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh realisasi anggaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa tahun 2018-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh akses air bersih terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa tahun 2018-2024.

3. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa tahun 2018-2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh realisasi anggaran pemerintah sektor pendidikan, akses air bersih, dan upah minimum secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa tahun 2018-2024 dengan pendekatan regresi data panel.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang digunakan oleh pihak-pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi pembaca

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh Realisasi Anggaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Akses Air Bersih dan Upah Minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa.

b. Bagi peneliti lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta menjadi dasar untuk pengembangan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan variabel yang berbeda.

c. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana pembelajaran bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan di bidang penelitian ilmiah, serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis.

2. Manfaat Praktis

a.a Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan, khususnya dalam pengalokasian anggaran pendidikan, peningkatan akses air bersih, serta penetapan kebijakan upah minimum guna meningkatkan capaian IPM di Pulau Jawa.

a.b Bagi Lembaga Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan acuan bagi akademisi maupun peneliti di bidang ekonomi dalam mengkaji permasalahan yang sejenis pada penelitian selanjutnya

a.c Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya peran kebijakan pemerintah dan infrastruktur dasar dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini memiliki beberapa batasan. Penelitian ini hanya mencakup wilayah provinsi yang berada di Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Periode penelitian dibatasi pada tahun 2018-2024. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan variabel independennya meliputi Realisasi Anggaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Akses Air Bersih, dan Upah Minimum. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi pemerintah, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemendikdasmen. Selain itu,

metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel, sehingga penelitian ini tidak membahas aspek kualitatif maupun faktor lain di luar variabel yang digunakan dalam model penelitian

